

**LAPORAN KEUANGAN
UAKPA/SATKER**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri Pertahanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya.

<Satker> adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Pertahanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan <Satker> mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada <Satker>. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

	Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi Daftar
Tabel Daftar
Singkatan
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan.
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran dan Daftar	

<SATKER>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan <Satker> yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2xx1 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatangan

.....

Laporan Keuangan <Satker> Tahun 2xx1 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2xx1.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2xx1 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp360.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp375.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp15.275.000.000 atau mencapai 98,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.550.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana 31 Desember 2xx1.

Nilai Aset Per 31 Desember 2xx1 dicatat dan disajikan sebesar Rp.15.385.820.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.734.750.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 13.380.000.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 71.070.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 200.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp245.000.000 dan Rp15.140.820.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2xx1 adalah sebesar Rp223.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.854.549.048 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(9.631.549.048). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp8.000.000 dan defisit sebesar Rp (75.000.000) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(9.698.549.048)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2xx1 adalah sebesar Rp9.839.494.048 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(9.698.549.048) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp237.885.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.761.990.000 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2xx1 adalah senilai Rp15.140.820.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam (CaLK) adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2xx1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2xx1 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**<SATKER>
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/
31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2xx1			TA 2xx0
		Anggaran	Realisasi	% thd Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	375.000.000	360.000.000	96,00	325.000.000
Jumlah Pendapatan		375.000.000	360.000.000	96,00	325.000.000
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.500.000.000	3.450.000.000	98,57	3.200.000.000
Belanja Barang	B.4	6.400.000.000	6.350.000.000	99,22	6.175.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	100.000.000	100.000.000	100,00	70.000.000
Jumlah Belanja Operasi		10.000.000.000	9.900.000.000	99,00	9.445.000.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	3.000.000.000	2.950.000.000	98.65	1.500.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	1.150.000.000	1.100.000.000	95.65	750.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	900.000.000	875.000.000	97.22	525.000.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	300.000.000	290.000.000	96.67	200.000.000
Belanja Modal Lainnya	B.10	200.000.000	160.000.000	80.00	140.000.000
Jumlah Belanja Operasi		5.550.000.000	5.375.000.000	96.85	3.115.000.000
JUMLAH BELANJA		15.550.000.000	15.275.000.000	98.23	12.560.000.000

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

.....

**<SATKER>
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/
30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(Dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	3.000.000	1.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	12.000.000	9.000.000
Piutang PNB	C.4	65.000.000	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	36.000.000	24.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjual Ansuran	C.6	12.000.000	9.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	C.7	(3.250.000)	(1.830.000)
Belanja Dibayar Dimuka	C.8	300.000.000	100.000.000
Persediaan	C.9	1.300.000.000	700.000.000
Jumlah Aset Lancar		1.734.750.000	896.770.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	54.000.000	45.000.000
Tagihan Penjualan Ansuran	C.11	18.000.000	25.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.12	(930.000)	(845.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		71.070.000	69.355.000
ASET TETAP			
Tanah	C.13	5.950.000.000	3.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.115.000.000	1.050.000.000
Gedung dan Bangunan	C.15	7.450.000.000	7.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	340.000.000	50.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	90.000.000	90.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	375.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(2.940.000.000)	(2.324.630.952)
Jumlah Aset Tetap		13.380.000.000	8.865.369.048
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	180.000.000	20.000.000
Aset Lain-Lain	C.21	145.000.000	110.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(125.000.000)	(60.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		200.000.000	70.000.000
JUMLAH ASET		15.385.820.000	9.901.494.048
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	10.000.000	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	35.000.000	12.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	200.000.000	50.000.000
Pendapatan Kewajiban Jangka Pendek		245.000.000	62.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		245.000.000	62.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	15.140.820.000	9.839.494.048
JUMLAH EKUITAS		15.140.820.000	9.839.494.048
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.385.820.000	9.901.494.048

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

.....

III. LAPORAN OPERASIONAL

**<Satker>
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/
30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(Dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	223.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		223.000.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.470.000.000	
Beban Persediaan	D.3	2.500.000.000	
Beban Jasa	D.4	550.000.000	
Beban Pemeliharaan	D.5	200.000.000	
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.700.000.000	
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	600.000.000	
Beban Bantuan Sosial	D.8	100.000.000	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	680.369.048	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	4.180.000	
Beban Lain-Lain	D.11	50.000.000	
JUMLAH BEBAN		9.854.549.048	
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.631.549.048)	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		12.000.000	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(1.500.000)	
Defisit Selisih Kurs		(2.500.000)	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.000.000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.623.549.048)	
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		10.000.000	
Beban Perjalanan Dinas		(30.000.000)	
Beban Persediaan		(55.000.000)	
SURPLUS DEFISIT		(9.698.549.048)	

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

.....

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**<SATKER>
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/
31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2xx1	2xx0
EKUITAS AWAL	E.1	9.839.494.048	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.698.549.048)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHANMENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ASET TETAP	E.3	50.000.000	-
KOREKSI ATAS BEBAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.4	277.885.000	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.5	(125.000.000)	-
Jumlah Lain-Lain	E.6	35.000.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		-	-
		237.885.000	-
	E.7	14.761.990.000	-
EKUITAS AKHIR		15.140.820.000	9.839.494.000

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

.....

<Satker>
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2xx1

A	Tanah	-					
1	Tanah	-	5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
	Jumlah		5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	240.000.000	190.714.000	34.285.714	225.000.000	15.000.000
2	Alat Kantor	5	900.000.000	90.000.000	180.000.000	270.000.000	630.000.000
3	Alat Rumah Tangga	5	500.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	350.000.000
4	Alat Komunikasi	5	115.000.000	-	23.000.000	23.000.000	92.000.000
5	Komputer Unit	4	100.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000
6	Peralatan Komputer	4	250.000.000	62.500.000	62.500.000	125.000.000	125.000.000
7	Peralatan Olah Raga	3	10.000.000	6.666.667	3.333.333	10.000.000	-
	Jumlah		2.115.000.000	424.880.952	428.119.048	853.000.000	1.262.000.000
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.450.000.000	1.362.500.500	109.000.000	1.471.500.000	3.978.500.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.000.000.000				1.596.500.000
	Jumlah		7.450.000.000	1.726.000.000	149.000.000	1.875.000.000	5.575.000.000
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	50.000.000	23.750.000	1.250.000	25.000.000	25.000.000
2	Jaringan Telepon	20	290.000.000	130.500.000	14.500.000	145.000.000	140.000.000
	Jumlah		340.000.000	154.250.000	15.750.000	170.000.000	170.000.000
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	375.000.000	-	-	-	375.000.000
	Jumlah		375.000.000	-	-	-	375.000.000
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang Bercorak Kesenian	4	90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
	Jumlah		90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
G	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud *)	-	180.000.000	20.000.000	36.000.000	56.000.000	124.000.000
2	Aset yang dihentikan penggunaannya	-	145.000.000	40.000.000	29.000.000	69.000.000	76.000.000
	Jumlah		325.000.000	60.000.000	65.000.000	125.000.000	200.000.000
	Total		16.645.000.000	2.384.630.952	680.369.048	3.065.000.000	13.580.000.000

*) Beban Amortisasi

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka Satker,

Nama Penandatanganan

.....

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis <Satker>

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

<Satker> didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan.

<Satker> mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Pertahanan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan Kementerian Pertahanan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan Akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di <Satker> berkomitmen dengan visi “**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas**” untuk mewujudkan akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Pertahanan
- Membina secara efektif Kementerian Pertahanan dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan

Laporan Keuangan Tahun 2xx1 ini merupakan Laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh <Satker>, Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertahanan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

<Satker> menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang telah diterapkan <Satker> dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digubakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2011 telah mengacu pada Standar akuntansi Pemerintah (SAP) kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari <Satker>. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan <Satker> adalah sebagai berikut :

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hakpemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

(2) **Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

(*Kementerian Pertahanan agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan LO sesuai karakteristik, pendapatn masing-masing entitas)

- Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3). **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disaksikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan belanja selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya

Aset

Aset Lancar

Lainnya

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasi, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan yang diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Perediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset
Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Pengeluaran yang tidak tercangkup dalam batasan nilai

minimum kapitalitas tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
jangka
panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
- atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk

dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa Aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan Diterima Di muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan pertimbangan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada

- Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Kontruksi dalam pekerjaan (KDP)
 - c. Asep tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian Laporan Keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklafikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp 360.000.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 adalah sebesar Rp360.000.000 atau mencapai 96,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp375.000.000. Pendapatan <Satker> terdiri dari Pendapatan Jasa dan pendapatan Lain-Lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2xx1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan Jasa	350.000.000	340.000.000	97.14
Pendapatan Lain-Lain	25.000.000	20.000.000	80.00
Jumlah	375.000.000	360.000.000	96.00

Realisasi Pendapatan jasa TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 10,77 persen dibandingkan TA 2xx0, Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi <Satker>, selain itu pendapatan lain-lain <Satker> mengalami kenaikan sebesar 33,33% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi pendapatan TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian	Realisasi T.A 2xx1	Realisasi T.A 2xx0	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	340.000.000	310.000.000	9.68
Pendapatan Lain-Lain	20.000.000	15.000.000	33.33
Jumlah	360.000.000	325.000.000	10.77

Realisasi Belanja
Negara
Rp15.275.000.000

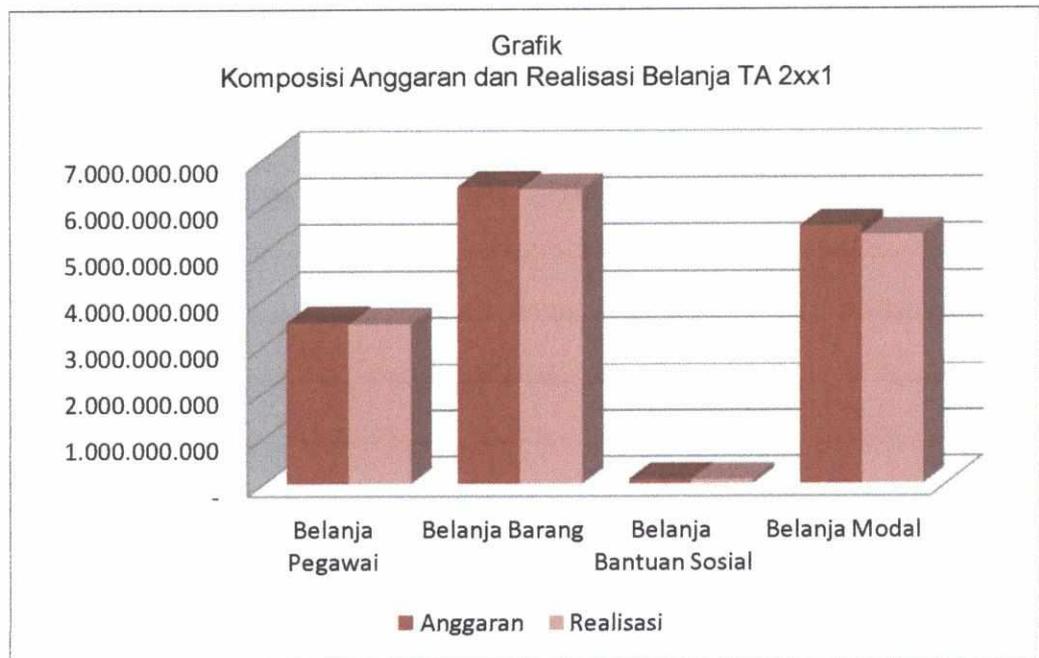
B.2. Belanja

Realisasi belanja <Satker> pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp15.275.000.000 atau sebesar 98,23% dari anggarannya belanja sebesar Rp.15.550.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2xx1 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2xx1

Uraian	2xx1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.500.000.000	3.475.000.000	99.29
Belanja Barang	6.400.000.000	6.350.000.000	99.22
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	100.00
Belanja Modal	5.550.0000.00	5.375.000.000	96.85
Total Belanja Kotor	15.550.000.000	15.300.000.000	98.39
Pengembalian Belanja	-	(25.000.000)	
Jumlah	15.550.000.000	15.275.000.000	98.23

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2xx0, Realisasi belanja TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 21,62% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategi yang dimulai pada TA 2xx1

2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian	Realisasi Ta 2xx1	Realisasi 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	3.450.000.000	3.200.000.000	7,81
Belanja Barang	6.350.000.000	6.175.000.000	2,83
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	70.000.000	42,86
Belanja Modal	5.375.000.000	3.115.000.000	72,55
Jumlah	15.275.000.000	12.560.000.000	21,62

Belanja Pegawai
Rp3.450.000.000

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp3.450.000.000 dan Rp3.200.000.000 Realisasi belanja TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen dari TA 2xx0. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan Remunerasi bagi pegawai Non PNS

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	2.500.000.000	2.400.000.000	4.17
Belanja Gaji dan Tunj. Non PNS	450.000.000	350.000.000	28.57
Belanja Honorarium	300.000.000	275.000.000	9.09
Belanja Lembur	150.000.000	125.000.000	20.00
Belanja Vakasi	75.000.000	65.000.000	15.38
Jumlah Belanja Kotor	3.475.000.000	3.125.000.000	8.09
Pengembalian Belanja Pegawai	(25.000.000)	(15.000.000)	66.67
Jumlah Belanja	3.450.000.000	3.200.000.000	7.81

Belanja Barang Rp
6.350.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp6.350.000.000 dan Rp6.175.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 mengalami kenaikan 2,83 % dari Realisasi Belanja Barang TA.2xx0. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan disamping menurunnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2xx1.

Perbandingan Belanja Barang TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.600.000.000	975.000.000	166,67
Belanja Barang Non Operasional	500.000.000	485.000.000	3,09
Belanja Jasa	750.000.000	740.000.000	1,35
Belanja Pemeliharaan	200.000.000	1.480.000.000	(86,49)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.700.000.000	1.900.000.000	(10,53)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	600.000.000	595.000.000	0,84
Jumlah Belanja Kotor	6.350.000.000	6.175.000.000	2,83
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlag Belanja	6.350.000.000	6.175.000.000	2,83

Belanja Bantuan Sosial
Rp 100.000.000

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dan Rp 70.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx0. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik (Turun) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	60.000.000	50.000.000	20,00
Kelompok Pendidikan Cendrawasih	40.000.000	20.000.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	100.000.000	70.000.000	42,86
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	100.000.000	70.000.000	42,86

Belanja Modal

Tanah

Rp2.950.000.000

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 2.950.000.000 dan Rp 1.500.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	2.300.000.000	1.100.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	230.000.000	110.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	90.000.000	60.000.000	50,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	200.000.000	150.000.000	33,33
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	130.000.000	80.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67

Belanja Modal

dan Peralatan dan

Mesin

Rp.1.100.000.000

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2xx1 adalah sebesar Rp 1.100.000.000 mengalami kenaikan sebesar 46,67 persen bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2xx0 sebesar Rp 750.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan

peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik (Turun) %
Komputer Unit	600.000.000	400.000.000	50,00
Peralatan	500.000.000	350.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.100.000.000	750.000.000	46,67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.100.000.000	750.000.000	46,67

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp 875.000.000*

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 875.000.000 dan Rp 525.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 40 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan tiga ruang kelas di sisi kanan bangunan yang telah ada dan ruang kelas tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik (Turun) %
Gedung Tempat Kerja	875.000.000	525.000.000	40,00
Jumlah Belanja Kotor	875.000.000	525.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	875.000.000	525.000.000	40,00

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp290.000.000*

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 290.000.000 dan Rp 200.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 45,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja modal TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	260.000.000	180.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	30.000.000	20.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	290.000.000	200.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	290.000.000	200.000.000	45,00

Belanja Modal
Lainnya
Rp 160.000.000

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 160.000.000 dan Rp 140.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 14,29 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp10.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

(Jabatan Bendahara Pengeluaran harus dengan Surat Keputusan) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca, Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan			TH 2xx1	TH 2xx0
Bank	BERSAMA	No.acc	7.000.000	-
82111487451				
Uang Tunai			3.000.000	-
Jumlah			10.000.000	-

Kas di Bendahara
Penerima
Rp. 3.000.000

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

(Jabatan Bendahara Penerimaan harus dengan Surat Keputusan) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar masing-masing Rp3.000.000 dan Rp1.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2xx1	TH 2xx0
Bank BERSAMA No.acc	2.000.000	250.000
82111487451		
Uang Tunai	1.000.000	750.000
Jumlah	3.000.000	1.000.000

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 12.000.000

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan Rp9.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TH 2xx1	TH 2xx0
Jasa giro yang belum disetor ke kas negara	500.000	300.000
Pajak PPh yang belum disetor	1.400.000	950.000
Honor kegiatan yang belum dibagikan	7.000.000	7.750.000
Pengembalian belanja belum disetor ke kas Negara	3.100.000	0
Jumlah	12.000.000	9.000.000

Piutang Bukan
Pajak
Rp65.000.000

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp65.000.000 dan Rp 55.000.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0
Piutang PNBPN	60.000.000	50.000.000
Piutang Lainnya	5.000.000	5.000.000
Jumlah	65.000.000	55.000.000

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp36.000.000

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp 36.000.000 dan Rp 24.000.000. Bagian Lancar TP/TGR

merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	Jacobus	12.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Karel	9.000.000	9.000.000
4	Darma	6.000.000	6.000.000
5	Julianda	3.000.000	-
6	Okta	6.000.000	6.000.000
Jumlah		36.000.000	24.000.000

Bagian Lancar
TPA
Rp12.000.000

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pert Tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp 12.000.000 dan Rp 9.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	Yohana	3.000.000	3.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Armando	2.400.000	2.400.000
4	Jaka S.	3.000.000	3.000.000
5	Rianti C.	-	1.200.000
Jumlah		12.000.000	9.600.000

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – piutang
jangka pendek

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp(3.250.000) dan Rp(1.830.000).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	50.000.000	0,50%	250.000
Kurang Lancar	20.000.000	10%	2.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	70.000.000		2.250.000
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	30.000.000	0,50%	150.000
Kurang Lancar	6.000.00	10%	600.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	36.000.000		750.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	10.000.000	0,50%	50.000
Kurang Lancar	2.000.000	10%	200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	12.000.000		250.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	118.000.000		3.250.000

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp300.000.000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp300.000.000 dan Rp100.000.000. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Belanja Di Bayar Dimuka

Jenis	THN 2xx1	THN 2xx0
Pembayaran Internet	30.000.000	30.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	70.000.000	70.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	200.000.000	-
Jumlah	300.000.000	100.000.000

Persediaan
Rp1.300.000.000

C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp1.300.000.000 dan Rp700.000.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2xx1	TH 2xx0
Barang Kosumsi	700.000.000	375.000.000
Barang untuk pemeliharaan	300.000.000	150.000.000
Suku cadang	170.000.000	90.000.000
Persediaan Lainnya	130.000.000	85.000.000
Jumlah	1.300.000.000	700.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal peiaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp500.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan TP/TGR
Rp54.000.000

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp54.000.000 dan Rp45.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

*Tabel 25
Rincian Tagihan TP/TGR*

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	Jacobus	24.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Karel	9.000.000	18.000.000
4	Darma	6.000.000	12.000.000
5	Julianda	9.000.000	-
6	Okta	6.000.000	12.000.000
	Jumlah	54.000.000	45.000.000

TPA

Rp.18.000.000

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp18.000.000 dan Rp25.200.000. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	Yohana	6.000.000	9.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Armando	2.400.000	4.800.000
4	Jaka S.	6.000.000	9.000.000
5	Rianti C.	-	2.400.000
Jumlah		18.000.000	25.200.000

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih —
Piutang Jangka
Panjang
Rp(930.000)

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(930.000) dan Rp(845.000). Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Perincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	50.000.000	0,50%	250.000
Kurang Lancar	4.000.000	10%	400.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	54.000.000		650.000
Tagihan PA			
Lancar	16.000.000	0,50%	80.000
Kurang Lancar	2.000.000	10%	200.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	18.000.000		280.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	72.000.000		930.000

Tanah
Rp5.950000.000

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki <Satker> A per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp5.950.000.000 dan Rp3.000.000.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2015. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	3.000.000.000
Mutasi tambah	
Pembelian	2.950.000.000
Mutasi Kurang	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2xx1	5.950.000.000

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2xx1 adalah sebagai berikutb:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5.000 m2	Jl.Cedrawasih No.5, Jayapura	1.000.000.000
2	2.000 m2	Jl.Matoa No.17, Jayapura	500.000.000
3	3.000 m2	Jl. Kanguru No.28, Jayapura	750.000.000
4	10.000 m2	Jl.Gunung Intan No.24, Jayapura	3.700.000.000
Jumlah			5.950.000.000

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Matoa NO.17, Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga

Peralatan dan
Mesin
Rp2.115.000.000

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp2.115.000.000 dan Rp1.050.000.000. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	1.050.000.000
Mutasi tambah	
Pembelian	1.100.000.000
Hibah Barang	15.000.000
Mutasi Kurang	0
Penghentian dari penggunaan	(50.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	2.115.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(853.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	1.262.000.000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp800.000.000; dan
- b. Pembelian peralatan komputer berupa printer senilai Rp300.000.000.
- c. Penerimaan hibah alat angkut darat bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.

Gedung dan
Bangunan
Rp 7.450.000.000.

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp50.000.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp7.450.000.000 dan Rp7.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	7.000.000.000
Mutasi tambah	
Pembangunan Tambahan Ruang Kelas	450.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2xx1	7.450.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(1.875.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	5.575.000.000

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan gedung tempat kerja berupa tiga ruang kelas di sisi kanan gedung induk senilai Rp450.000.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp340.000.000

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp340.000.000 dan Rp50.000.000. Pada tahun 2xx1 terjadi mutasi tambah sebesar Rp 290.000.000 yang merupakan penambahan jaringan

teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	50.000.000
Mutasi tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	290.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2xx1	340.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(170.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	170.000.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Tetap
Lainnya Rp
90.000.000

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, Irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp90.000.000 dan Rp90.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2015, Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp375.000.000

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp375.000.000 dan Rp0. yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan Gedung tersebut sesuai Kontrak No.02/KPA.KAINII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dengan nilai Rp1.000.000.000 dengan sumber dana rupiah murni. Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 37,5%.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(2.940.000.000)

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing Rp (2.940.000.000) dan

Rp (2.324.630.952). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Kontruksi dalam pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi Penyusutan Aset Tetap pertanggal 31 Desember 2xx1 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.115.000.000	853.000.000	1.262.000.000
2	Gedung dan Bangunan	7.450.000.000	1.875.000.000	5.575.000.000
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	340.000.000	170.000.000	170.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	90.000.000	42.000.000	48.000.000
Akumulasi Penyusutan		9.995.000.000	2.940.000.000	7.055.000.000

Aset Tak Berwujud
Rp180.000.000

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2xx1 dan 31 Desember 2xx0 adalah Rp180.000.000 dan Rp20.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	20.000.000
Mutasi tambah	
Pembelian	160.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2xx1	180.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(50.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	130.000.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi Penatausahaan PNB	100.000.000
MYOB Accounting Profesional	80.000.000
Jumlah	180.000.000

Aset Lain-Lain
Rp 145.000.000

C.21 Aset Lain-Lain

Saida Aset Lain-lain per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp145.000.000 dan Rp110.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2xx0	110.000.000
Mutasi tambah	
- Reklasifikasi dari aset tetap	50.000.000
Mutasi Kurang	
- Penggunaan Kembali BMN yang telah dihentikan	-
- Penghapusan BMN	(15.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	145.000.000
Akumulasi Penyusutan	(25.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	120.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp50.000.000.
- Penghapusan Alat Angkut Darat Bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
RP (125.000.000)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing Rp(125.000.000) dan Rp(60.000.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan

kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisi	Nilai Buku
Tak Berwujud	180.000.000	56.000.000	124.000.000
Aset Lain-Lain	145.000.000	69.000.000	76.000.000
Jumlah	325.000.000	125.000.000	200.000.000

Uang Muka dari KPPN
Rp 10.000.000

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masingmasing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 35.000.000

C.24. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masingmasing sebesar Rp35.000.000 dan Rp12.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua betas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada <Satker> per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	20.000.000	Kekurangan pembayaran gaji berkala 9 orang pegawai
Belanja Barang yang masih harus dibayar	1.000.000	Penggunaan langganan daya dan jasa yangn belum dibayar
Uang Kepada Pihak Ketiga	12.000.000	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	35.000.000	

Pendapatan
Diterima dimuka
Rp200.000.000

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 sebesar Rp200.000.000 dan Rp50.000.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dan satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dan pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Pradnya Consultindo	60,000,000
PT, Dua Dunia	50,000,000
Symphony and Co,	50,000,000
PT Celkornindo Indonesia	50,000,000
Total	200,000,000

Ekuitas
Rp15.140.620.000

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp15.140.820.000 dan Rp9.839.494.048. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 223.000.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp223.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Penjelasan atas pos-pos penerimaan negara bukan pajak

	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	198.000.000		-
Pendapatan Lain-lain	25.000.000		
Jumlah	223.000,000		-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LC merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2xx1.

Beban Pegawai
Rp 3.470.000.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp3.470.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN)
Beban Gaji	2,300,000,00	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	945,000,000		-
Beban Honorarium dan Vakasi	375,000,000		
Beban Lembur	150,000,000		-
Jumlah	3.470,000,00	-	-

Beban Persediaan
Rp2.500.000.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.500.000.000 dan Rp0. Beban Persediaan

merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Belanja	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Beban Persediaan	1,800,000,000	-	
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	200,000,000		-
Beban Persediaan Suku Cadang	400,000,000		-
Beban Persediaan Lainnya	100,000,000	-	
Jumlah Beban Persediaan	2,500,000,000	-	-

Beban Jasa
Rp550.000.000

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp550.000.000 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Beban Langganan Daya dan Jasa	55,000,000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	31,000,000		
Beban Jasa Konsultan	100,000,000		
Beban Jasa Profesi	341,000,000		
Beban Jasa Lainnya	13,000,000		
Jumlah	550,000,000		

Beban
Pemeliharaan
Rp200.000.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian jenis beban	Th 2xx1	Th 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	10.000.000	-	-
Jumlah	200.000.000	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.700.000.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.700.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	925.000.000		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000.000		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	325.000.000		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,000.000		-
Jumlah_	1.700.000.000		

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp600.000.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenal akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2xx1. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2xx1 dan 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	100,000,000		
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	350,000,000		
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	150.000,000	-	
Jumlah	600,000,000	-	-

Beban Bantuan
Sosial
Rp100.000.000

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan RpO. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif, Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2xx1 dan 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk	15,000,000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan	30,000,000		-
Beban Bantuan Sosial Untuk	55,000,000	-	-
Jumlah	100,000,0	-	-

Beban Peny. Dan
Amortisi
Rp.680.369.048

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp680.369.048 dan RpO. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Saban Penyusutan dan Amortisasi Tabun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Para latan dan Mesin	428.119,048	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan	149.000.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, trigasi,	15.750,000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.500.000	-	-
Jumlah Penyusutan	615.369.048	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	36.000,000	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	29.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	65.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan	680.369.048	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp4.180.000

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp4.180.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tabun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih -	3.250.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih -	930,000	-	-
Jumlah	4.180.000	-	-

Beban Lain-Lain
Rp50.000.000

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp50.000,000 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	Th 2xx1	Th 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan	12.000.000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan	30.000.000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap	8.000.000	-	-
Jumlah	50.000.000	-	-

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp8.000.000

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut Darat	12.000.000		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	(1.500.000)		
Defisit Selisih Kurs	(2.500.000)		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8.000.000		

Pos Luar Biasa
Rp(75.000.000)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendati entitas. Rincian Pus Luar Biasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP	10.000.000		-
Beban Perjalanan Dinas	(30.000.000)	-	
Beban Persediaan	(55.000.000)		-
	(75.000.000)	-	

Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura. Sedangkan Beban Perjaianan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp 9.839.494.048

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp9.839.494.048 dan Rp0

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus LO Rp
(9.698.549.048)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp(9.698.549.048) dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai
persediaan
Rp 50.000.000

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Kosumsi	30.000.000
Suku Cadang	15.000.000
Barang Persediaan Lainnya	5.000.000
Jumlah	50.000.000

Koreksi Aset Tetap
Rp277.885.000

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp277.885.000 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atsa
Beban
Rp(125.000.000)

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2xx1

dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(125.000.000) dan Rp0. Rincian untuk tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	100.000.000
Beban Jasa	25.000.000
Jumlah	125.000.000

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp20.000.000

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	15.000.000
Pendapatan Lainnya	5.000.000
Jumlah	20.000.000

Ekuitas Akhir
Rp15.140.820.000

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp15.140.820.000 dan Rp9.839.494.048

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 20xx telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut <Satker> telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: Kep/xxxxx/xx/xxxx Tentang Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Satker telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Denny SF
Pejabat Pernbuat Komitmen	: Fitra
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Komang
Bendahara	: Yessy

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mutiara
Pejabat Pembuat Komitmen	: Meini
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Fajar
Bendahara	: Martha

FORMAT 10

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN DAN HIBAH SATKER MELALUI KPPN
UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1**
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
ESELON I :
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA :
JENIS SATUAN KERJA :

Kode Lap : LRPSW/02
Tanggal :
Halaman :
Prig id :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				%REAL PEND.
			TRIWULAN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI 5	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI 6	JUMLAH NETTO S.D TRIWULAN INI 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
I XX	TRANSAKSI KAS PENERIMAANDALAM						
XXX	NEGERI/PENERIMAAN NEGARA						
XXXX	BUKAN PAJAK PENDAPATAN PNBP						
XXXX	LAINNYA						
XXXX	URAIAN PENDAPATAN						
XXXXXX	URAIAN PENDAPATAN						
	URAIAN PENDAPATAN						
	Jumlah Penerimaan XXXXXX						
	Jumlah Penerimaan XXXX						
	Jumlah Penerimaan XXX						
	Jumlah Penerimaan XX						
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)						

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SAKTER MELALUI KPPN
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2x1/30 JUNI 2x1/30 SEPTEMBER 2x1/31 DESEMBER 2x1*)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 ESELON I
 WILAYAH/PROPINSI
 SATUAN KERJA
 JENIS SATUAN KERJA

Kode Lap : LPPE W.01b/LRPS W.01
 Tanggal :
 Halaman :
 Prig.id :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			%REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH S.D TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I XX	TRANSAKSI KAS PENERIMAANDALAM					
XXX	NEGERI/PENERIMAAN NEGARA					
XXXX	BUKAN PAJAK PENDAPATAN PNBP					
XXXX	LAINNYA					
XXXX	URAIAN PENDAPATAN					
XXXXXX	URAIAN PENDAPATAN					
	URAIAN PENDAPATAN					
	Jumlah Penerimaan XXXXXX Jumlah					
	Penerimaan XXXX					
	Jumlah Penerimaan XXX					
	Jumlah Penerimaan XX					
	JUMLAH Penerimaan Dalam Negeri					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS					

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 BELANJA SATKER
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2011/30 JUNI 2011/30 SEPTEMBER 2011/31 DESEMBER 2011*)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 ESELON I
 WILAYAH/PROVINSI
 SATUAN KERJA
 JENIS SATUAN KERJA

Kode Lap : LRBS W.01
 Tanggal :
 Halaman :
 Prig id :

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S.D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO S.D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 (6 : 4)	10 (4 - 6)
X	TRANSAKSI KAS URAIAN								
XX	SUMBER DANA URAIAN								
XX	CARA PENARIKAN URAIAN								
XX	FUNGSI								
XX	URAIAN SUB FUNGSI								
XX	Uraian Program								
XXXX	Uraian Kegiatan								
XX	Uraian Output								
XX	URAIAN KELOMPOK BELANJA								
XXXX	Uraian Sub Kelompok Belanja								
XXXXXX	Uraian belanja								
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX								
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX								
	JUMLAH BELANJA OUTPUT XXXX.XX								
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXX								
	JUMLAH BELANJA PROGRAM XX.XX.XX								
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI XX.XX								
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX								
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN X								
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX								
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER XX								
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS								
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)								

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA
 PENGEMBALIAN BELANJA SATKER MELALUI KPPN
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 20x1/30 JUNI 20x1/30 SEPTEMBER 20x1/31 DESEMBER 20x1*)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 ESELON I
 WILAYAH/PROPINSI
 SATUAN KERJA
 JENIS SATUAN KERJA

Kode Lap : LRBS W.01
 Tanggal :
 Halaman :
 Prig Id :

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA		8 (7 : 4)	9 (4 - 7)
				ANGGARAN SETELAH REVISI	ANGGARAN SEMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 (7 : 4)
X	TRANSAKSI KAS						
XX	URAIAN SUMBER DANA						
XX	URAIAN CARA PENARIKAN						
XX	URAIAN FUNGSI						
XX	URAIAN SUB FUNGSI						
XX	Uraian Program						
XXXX	Uraian Kegiatan						
XXX	Uraian Output						
XX	URAIAN PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA						
XXXX	Uraian Pengembalian Sub Kelompok Belanja						
XXXXXX	Uraian Belanja						
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA XXXX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT XXXX.XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN XXXX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM XX.XX.XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI XX.XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN X						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA XX						
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS SATKER						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA TRANSAKSI KAS						
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)						

FORMAT 14

**NERACA PERCOBAAN
SATKER
PER 31 MARET 2xx1/PER 30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1*)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
ESELON I :
WILAYAH/PROPINSI :
SATUAN KERJA :
JENIS SATUAN KERJA :

Kode Lap : NPSAIKT
tanggal :
Halaman :
Prig id :

KODE TRANSAKSI	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	113712	Piutang dari KPPN		xx
0	212511	Utang kepada KUN	xx	
3	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri		xx
3	511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	xx	-
3	511169	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	xx	-
3	511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/POLRI	xx	-
3	511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/POLRI	xx	-
				-
				-
			xxx	xxx

*) coret yang tidak perlu

4. Lap Barang Bersejarah

Satker :

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
BARANG BERSEJARAH RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2XX1**

Tanggal :
Halaman : 1
Kode Lap : LBSSKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU

KODE	AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2XX1 KUANTITAS	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2XX1 KUANTITAS
				BERTAMBAH KUANTITAS	BERKURANG KUANTITAS	
1	URAIAN 2	3	4	5	6	7

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan
.....

6. Lap Konstruksi Dalam Pekerjaan

Satker :

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Halaman :1
Kode Lap :LBSKKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2XX1	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEVINITIP	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	NILAI 6	7
1	2					
	TOTAL					

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan
.....

7. Lap Penyusutan Intra

Satker :

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
PENYUSUTAN INTRA RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Halaman : 1
Kode Lap : LPSIKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		
			KUANTITAS	NILAI	AK.PENYUSUTAN
1	2	3	4	5	6
					7
	TOTAL				

Jakarta,..... 2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan
.....

8. Lap Penyusutan Eksta

Satker :

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
PENYUSUTAN EKSTRA RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Halaman : 1
Kode Lap : LPSEKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU

KODE	AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER			NILAI BUKU
			31 DESEMBER	2XX1		
	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL					

Jakarta,2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan
.....

9. Lap Penyusutan Gabungan

Satker :

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 PENYUSUTAN GABUNGAN INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
 Halaman :1
 Kode Lap :LPSGKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO PER	
					31 DESEMBER	2XX1
			4	5	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3			6	7
	TOTAL					

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan

10. Laporan Persediaan

Satker :

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2XX1**

NAMA UKPB : SATKER BARU

KODE UAKPB :

KODE	URAIAN	
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Jakarta,.....2XX1
Petugas Pengelola Persediaan

Nama Penandatanganan
.....

11. Laporan Neraca

Satker :

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2XX1
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Halaman :1
Kode Lap :LBAPKT

NAMA UAKPB : 012.01.00.010800 SATKER BARU
NERACA

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	JUMLAH	0
		0

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAKPB

Nama Penandatanganan
.....

FORMAT 16

RENCANA TINDAK SATKER
 TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2XX1

SATKER :

NOMOR	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK	JADUAL PENYELESAIAN
		I	II	II		
1	2	3	4	5	6	7

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama Penandatanganan

FORMAT 17

DAFTAR REKENING SATKER
UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2XX1

SATKER :

NO	KANTOR SATUAN KERJA	KEMHAN/ UNIT ORGANISASI	BA	JENIS REKENING (GIRO/DEPOSITO)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REKENING ATAS NAMA	BANK/ KANTOR POS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) Coret yang tidak perlu

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama Penandatanganan

.....

FORMAT 18

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN			
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)			
SEMESTERAN/TAHUNAN TA 20xx			
Kode dan Nama UAKPA : (.....)			
Kode dan Nama UAPPAW : (.....)			
Kode dan Nama E1 : (.....)			
Kode dan Nama K/L: (.....)			
Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA face per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
3. Neraca per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
4. Laporan Operasional per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LPE			Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Akrual pada LK sama dengan Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
2. Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
3. Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
4. Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama

5. Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK sama dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
<i>Apabila terdapat perbedaan, agar diuraikan apa saja yang berbeda dan apa sebabnya pada Lampiran Telaah.</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) (<i>kec. Pengembalian Pendapatan</i>)			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali beban Penyisihan Piutang</i>)			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (<i>untuk LK Tahunan tidak boleh ada</i>)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>kec. Di RN, TVR dan POLN</i>			Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
4. Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) <i>cat: seharusnya 423221</i>			Tidak
5. Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)			Tidak
6. Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)			Tidak
7. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
8. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
9. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
10. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
<i>Catatan: KL dapat menambahkan akun-akun lainnya yang tidak boleh ada</i>			
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum Disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/jasa</i>			Ya
2. Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?			
3. Jika ada Akun 111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) maka ada akun 391131 (Pengesahan Hibah Langsung), atau kebalikannya. <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/jasa</i>			
4. Nilai 111822 lebih kecil atau sama dengan nilai 391131?			Ya
Transfer Masuk dan Transfer Keluar	Ya	Tidak	Seharusnya

1. Apakah mungkin ada transfer masuk dan transfer keluar?			Ya/tidak
2. Apakah seharusnya transfer masuk sama dengan transfer keluar?			Ya/tidak
3. Apakah seharusnya transfer masuk lebih besar dari transfer keluar?			Ya/tidak
4. Adakah pengawasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk?			Ya
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN?			Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<i>Seluruh Nilai Nominal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			
9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg
10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015			
	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			

Pengecekan Antar Laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?			Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Material), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			
13. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?			Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kode kelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah akun "Ekuitas Awal" sama dengan akun "Ekuitas Akhir" LPE Tahun lalu Audited?			Ada
2. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
3. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap"? Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jumlah kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK			Tidak
NERACA			
Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon			Sama
3. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon			Sama
4. Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon			Sama
Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER"? Untuk LK Tahunan Tidak Boleh Ada			Tidak
2. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan"?			Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak

-	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada
-	Beban Persediaan (di LO)			Ada
-	Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada
4.	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
-	Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
-	Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
5.	Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
-	Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
6.	Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
-	Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
7.	Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
-	Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)			Ada

TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan SIMAK			Sama

Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar-Daftar Transaksi BMN

	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?			Sama

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak

akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
3 Kesamaan dengan BAR KPPN			Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)			Sama

Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah/PMK 177/2015 ?			Ya
3. Adakah daftar Saldo kas di bendahara Pengeluaran, Hibah Langsung dan BLU?			Ya
4. Pada Penjelasan Umum apakah sudah ada Klausul: Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2015? → Khusus Tahun 2015 saja			Ya
5. Sudahkan menjelaskan nilai Ekuitas Awal pada Penjelasan atas Pos-pos LPE?			Ya
6. Apabila Nilai di Pos-pos LPE besar/material, sudahkan ada penjelasan yang cukup?			Ya

Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya/tidak
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?			Ya/tidak
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?			Ya/tidak
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Satker?			Ya
5. Apakah ADK yang dikirim ke UAPPA-W dan Eselon 1 sudah yang paling akhir?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya:

- *Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU (akun 525111) + selisih Belj Peg Yg M sh Hrs Dibayar*
- *Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA + selisih Piutang Pengembalian Perjudin + selisih Pengembalian Perjudin yang masih di Bendahara*
- *Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer keluar-penghapusan + Transfer Masuk + Hibah Barang + Perolehan Aset Lainnya + Koreksi*
- *dll*

Mengetahui

Pejabat Penyusun
Laporan Keuangan,

Penelaah,

NIP

NIP.

**BERITA ACARA REKONSILIASI
UANG DAN BARANG PADA PROGRAM
FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
ANTARA
SATKER PENGADAAN UO (.....)
DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun 2020 telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus pembiayaan Program *Foreign Military Sales (FMS)* antara Satker Pengadaan UO (.....) dengan Perwira FMS di Amerika Serikat melalui Kabag Malur Ses Baranahan Kementerian Pertahanan.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker UO (.....) Semester I TA. 2020.

Hasil Rekonsiliasi ini dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah LOA Semester I TA.2020.

Terdapat perbedaan jumlah LOA : sebesar USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total LOA :sebesar USD.....

2. Saldo per 31 Desember 2019 (saldo awal TA.2020).

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

3. Jumlah Dana yang diterima s.d 30 Juni 2020.

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah Total USD.....

4. Jumlah Pembayaran s.d 30 Juni TA. 2020.

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah Total USD.....

5. Jumlah Saldo per 30 Juni 2020 (Semester I TA 2020).

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

6. Jumlah Penyajian (uang muka belanja) per 30 Juni 2020 (Semester I Tahun 2020)

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 2020
a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat
Kabag Malur Ses Baranahan
Selaku Pejabat Penanggung jawab
Rekonsiliasi Perwira FMS

Nama
.....NRP.....

Mengetahui:
a.n. Pejabat UAPA
Kabag/Kabid.....

Nama
.....NRP.....

Jakarta, 2020
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
.....
Selaku Pejabat Penanggung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
.....NRP.....

Mengetahui:
a.n. Pejabat UPPA Es. 1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
.....NRP.....

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 1

REKONSILIASI UANG, BARANG DAN JASA DARI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
 ANTARA SATKER PENGADAAN : SATKER UO (....) DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
 PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
 Eselon-1 : 01 Kementerian Pertahanan
 Wilayah/Provinsi :
 Kode Satker : Satker
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA		SALDO AWAL 31 DESEMBER 2019		PEMBAYARAN (COLLECTED) s.d 30 JUNI 2020		BARANG & JASA DITERIMA (DELIVERED)		SALDO AKHIR 30 JUNI 2020 / 31 DESEMBER 2020		KET	
		JUMLAH	NILAI	USD	RP	USD	RP	USD	RP	USD	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERWIRA FMS												
2	UO												
3	JUMLAH SELISIH												

Keterangan:

- 1 LOA
- 2 LOA
- 3 LOA
- 4 LOA

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA
 Kabag/Kabid

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA Es.1 UO
 Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Jakarta, 2020
 a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat
 Kabag Malur Ses Baranahan
 Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi
 Perwira FMS

Jakarta, 2020
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Selaku Pejabat Penanggung jawab
 Rekonsiliasi UAKPA

Nama
 NRP

Nama
 NRP

Nama
 NRP

Nama
 NRP

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 2

REKONSILIASI DANA YANG DITERIMA PERWIRA FMS DENGAN PEMBAYARAN (COLLECTED)

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
 Eselon-1 : 01 Kementerian Pertahanan
 Wilayah/Provinsi :
 Kode Satker : Satker
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	*LOA		DANA YANG DITERIMA		PEMBAYARAN (COLLECTED)		**KET JUMLAH SALDO DI REKENING BANK
		NO	USD	RP	USD	RP	USD	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	PERWIRA FMS							
2	UO							
3	JUMLAH SELISIH							

Keterangan:

- *1 LOA
- 2 LOA
- 3 LOA
- 4 LOA

** sebagai bahan rekonsiliasi

Jakarta, 2020	Jakarta, 2020	Jakarta, 2020
a.n. Pejabat UAPA Kabag/Kabid	a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat Kabag Malur Ses Baranahan Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi Perwira FMS	a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi UAKPA

Nama
 NRP

Nama
 NRP

Nama

Nama
 NRP

FORMAT 20

Realisasi Pembayaran Dana Cadangan Alutsista Kemhan dan TNI Satker/UAKPA

No	Nomor/Supplier/Deskripsi Kontrak	Tanggal Pekerjaan		Mata Uang	Nilai Kontrak	Pembayaran Melalui Dana Cadangan	Nomor SKP	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Sisa
		Mulai	Selesai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (7-10)

Jakarta, 2xx1
 Penanggung Jawab UAKPA

Nama Penandatanganan

Kepala
 Pusat Pelaporan dan Pembinaan
 Kementerian Pertahanan,

 Agus Supriadi, S.Sos
 Laksamana Pertama TNI